KR GROUP
http://www.krjogja.com

Kedaulatan Rakyat

Suara Hati Nurani Rakyat

Terbit Sejak 27 September 1945

Kedaulatan Rakyat EPAPER www.kr.co.id

BERLANGGANAN SCAN BARCODE

SABTU PON | 2 MARET 2024 (20 RUWAH 1957 / TAHUN LXXIX NO 151) | HARGA RP 4.000 / 16 HALAMAN

KR-Antara/Hendra Nurdiyansyah

***TEATRIKAL SU 1 MARET:** Komunitas Djokjakarta 1945 menampilkan drama teatrikal perang di Stadion Mandala Krida, Yogyakarta, Jumat (1/3/2024). Teatrikal tersebut merefleksikan peristiwa perjuangan masyarakat Yogyakarta melawan penjajahan Belanda pada 1 Maret 1949 yang dikenal dengan Serangan Umum (SU) 1 Maret 1949 serta memperingati Hari Penegakan Kedaulatan Negara.*

BAWASLU PERSOALKAN PPLN ISLAMABAD

Ada Dugaan Pelanggaran Administrasi

JAKARTA (KR) - Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Lolly Suhenty menyebutkan, terdapat dugaan pelanggaran administrasi oleh Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Islamabad Pakistan.

Lolly di Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Jumat (1/3), menjelaskan, PPLN Islamabad diduga melanggar administrasi dengan mengizinkan 21 pemilih yang belum terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT) menjadi daftar pemilih tambahan (DPTb) tanpa membawa form A pindah memilih.

Kalau melihat regulasi UU No 7/2017 tentang Pemilu, menurutnya, seharusnya tidak masuk sebagai DPTb, tetapi harus masuk dalam daftar pemilih khusus (DPK). "Karena proses ini, pelanggaran administrasi akan diproses," kata Lolly.

Berdasarkan regulasi, jelasnya, DPTb harus menggunakan form untuk pindah memilih. Hal ini bisa dilayani sampai pukul 08.00 waktu setempat pada hari pemungutan suara. Tetapi, berdasarkan catatan Bawaslu, PPLN Islamabad tidak menyediakan form A pindah memilih untuk 21 pemilih tersebut.

"Saran perbaikan Bawaslu waktu itu, Panwaslu memberikan saran perbaikan berupa peringatan secara lisan untuk menunjukkan atau menyediakan form A pindah memilih. Namun, tidak ditindaklanjuti PPLN," ujarnya.

Walaupun demikian, PPLN Islamabad memasukkan 21 pemilih itu dalam DPTb dengan catatan nama pemilih tercatat di dalam negeri.

*** Bersambung hal 7 kol 1**

Atur Ulang Besaran Angka dan Persentase

MK Tak Hapus Ambang Batas Parlemen

JAKARTA (KR) - Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan, putusan gugatan uji materi yang diajukan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) tidak menghapus ambang batas parlemen (parliamentary threshold) empat persen. MK dalam amar putusannya, meminta pembentuk undang-undang untuk mengatur ulang besaran angka dan persentase ambang batas parlemen dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu agar lebih rasional.

"Putusan 116/PUU-XXI/2023 tidak meniadakan threshold, sebagaimana dapat dibaca dari amar putusan bahwa threshold dan besaran angka persentase-nya diserahkan ke pembentuk undang-undang untuk menentukan threshold yang rasional," ucap Hakim Konstitusi sekaligus Juru Bicara MK Enny Nurbaningsih di Jakarta, Jumat (1/3).

MK menegaskan, ambang batas parlemen sepatutnya ditentukan dengan

*** Bersambung hal 7 kol 5**

Analisis

Makan Siang Gratis

Anif Muchlashin MA

STUNTING masih menjadi isu strategis negara ini yang masuk dalam pembahasannya. Bahkan diangkat saat debat capres-cawapres lalu. Sayangnya, persoalan belum dipahami beberapa pihak. Jika salah paham membaca isu dan diaktualisasikan dalam sebuah kebijakan, maka justru kebijakan yang keliru bukan menjadi solusi dari sebuah permasalahan. Salah satunya adalah pemberian makan siang gratis untuk mencegah stunting.

Pasalnya, penurunan angka stunting di pemerintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat ini masih memiliki tantangan dan hambatan. Penurunan angka prevalensi stunting tahun 2021 ke 2022 baru 2,8%, dari target idealnya 3,4 pertahun agar sesuai target pada 2024. Pemerintah Jokowi memiliki target prevalensi stunting mencapai 14% di tahun 2024. Sementara Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022 menyatakan, angka prevalensi stunting di Indonesia baru mencapai 21,6%. Angka yang masih cukup tinggi untuk memenuhi target 14% di 2024. Tentu ini masih menjadi PR tersendiri bagi presiden berikutnya.

*** Bersambung hal 7 kol 1**

JADWAL SALAT	Zuhur	Asar	Magrib	Isya	Subuh
Sabtu, 2 Maret 2024	11:54	14:56	18:01	19:10	04:28

Sumber: Kementerian Agama Kanwil Provinsi DIY

FIRLI BAHURI BELUM DITAHAN

Kapolri dan Kapolda Metro Digugat

KR-Antara /Reno Esnir

Mantan Ketua KPK Abraham Samad, mantan Wakil Ketua KPK Mochammad Jasin, Ketua PBHI Nasional Julius Ibrani, mantan Wakil Ketua KPK Saut Situmorang, Peneliti ICW Kurnia Ramadhana, dan mantan penyidik KPK Novel Baswedan saat akan mengirimkan surat kepada Kapolri.

JAKARTA (KR) - Gara-gara belum juga menahan mantan Ketua KPK Firli Bahuri, Kapolri dan Kapolda Metro Jaya digugat praperadilan. Gugatan dilayangkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) oleh Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) bersama Lembaga Pengawasan, Pengawalan dan Penegakan Hukum Indonesia (LP3HI) serta Lembaga Kerukunan Masyarakat Abdi Keadilan Indonesia (KEMAKI).

Gugatan tersebut dilayangkan oleh Koordinator MAKI Boyamin Saiman pada Jumat (1/3), terdaftar dengan nomor: 33/Pid.Pra/2024/PN.Jkt.Sel.

*** Bersambung hal 7 kol 5**

ANDHI TERIMA GRATIFIKASI RP 58,9 M

Setoran Rp 20 M Tanpa Identitas

JAKARTA (KR) - Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (JPU KPK) mengungkapkan sebanyak Rp 20 miliar dana yang disetorkan secara tunai ke delapan rekening terafiliasi dengan mantan Kepala Kantor Bea dan Cukai Makassar Andhi Pramono tak ada identitas. Adapun Andhi didakwa menerima gratifikasi senilai total Rp 58,9 miliar dari sejumlah pihak terkait pengurusan kepabeanan impor. Dana tersebut diduga diterima melalui berbagai rekening, baik rekening pribadi Andhi maupun orang lain.

"Dari delapan rekening BCA yang kami dakwakan kepada saudara, tercatat keseluruhan 254 kali transaksi setor tunai masuk jumlahnya Rp 22,76 miliar. Tetapi sebanyak Rp 20 miliar yang diterima tidak ada identitas pengirim," ujar JPU KPK dalam sidang pemeriksaan dugaan penerimaan gratifikasi oleh Andhi Pramono di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta, Jumat (1/3).

Hasil analisa forensik, terdapat 19 rekening dalam perkara yang terafiliasi dengan dugaan penerimaan gratifikasi Andhi. Dari banyaknya rekening tersebut, tercatat delapan rekening BCA yang terafiliasi dengan Andhi menerima setor tunai sebanyak Rp 22,76 miliar dalam rentang waktu 22 Maret 2012 hingga 18 Mei 2022. "Rentang waktu tersebut merupakan saat Andhi Pramono menjabat sebagai Pj Kepala Seksi Penindakan Kantor Wilayah Ditjen Bea Cukai Riau dan Sumatera Barat hingga Kepala Kantor Bea dan Cukai Makassar," ungkapnya.

*** Bersambung hal 7 kol 1**

Gunung Merapi Luncurkan 5 Kali Guguran Lava

YOGYA (KR) - Gunung Merapi di perbatasan Jawa Tengah (Jateng) dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada Jumat (1/3) meluncurkan guguran lava sebanyak lima kali ke arah dua sungai yang terletak di Selatan dan Barat Daya gunung.

Kepala Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi (BPPTKG) Yogyakarta Agus Budi Santoso dalam keterangan di Yogyakarta menyebutkan, berdasarkan pengamatan pukul 00.00-06.00 WIB, guguran lava dengan jarak luncur paling jauh 1.500 meter (1,5 km) itu meluncur ke arah Kali Bebeng (Barat Daya) dan Kali Boyong (Selatan).

"Teramati empat kali guguran lava ke arah Kali Bebeng dengan jarak luncur maksimum 1.500 meter. Teramati satu kali guguran lava ke arah Kali Boyong dengan jarak luncur 1.000 meter," kata Agus.

Selama periode pengamatan itu, Gunung Merapi juga mengalami 13 kali gempa guguran dengan amplitudo 3-20 mm selama 32.6-140.2 detik, dua kali gempa fase banyak dengan amplitudo 3-9 mm selama 6.12-8.5 detik, dan gempa tektonik jauh dengan amplitudo 8-9 mm selama 71-131.88 detik. Asap kawah bertekanan lemah di atas puncak Gunung Merapi teramati berwarna putih dengan intensitas sedang dan tinggi 50 meter di atas puncak kawah.

*** Bersambung hal 7 kol 5**

FEBRUARI MASIH ALAMI INFLASI

Produksi Beras Nasional Turun 440.000 Ton

JAKARTA (KR) - Badan Pusat Statistik (BPS) menyebut produksi beras nasional pada tahun 2023 mencapai 31,10 juta ton, turun 440.000 ton atau 1,39 persen dibandingkan 2022 yang mencapai 31,54 juta ton.

"Penurunan produksi beras merupakan konsekuensi dari penurunan luas panen padi dan produksi padi yang terdampak El Nino," ujar Deputi Bidang Statistik Produksi BPS M Habibullah dalam pemaparan Berita Resmi Statistik di Jakarta, Jumat (1/3).

Habibullah mengatakan, jumlah produksi beras pada periode Januari-April 2023 mencapai 12,98 juta ton. Namun, prediksi BPS untuk produksi beras Januari-April 2024 hanya 10,71 juta ton atau turun 17,52 persen.

Produksi beras mengalami penurunan di sebagian besar pulau, terutama Pulau Jawa. Berdasarkan wilayah, provinsi yang mengalami penurunan tertinggi antara lain Sulawesi Selatan, Jawa Barat, Jawa Tengah, Aceh dan Banten. Namun demikian, terdapat beberapa provinsi yang mengalami kenaikan produksi beras antara lain Jawa Timur, Sumatera Barat, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Tengah dan Lampung.

*** Bersambung hal 7 kol 1**

KR-Antara/Nova Wahyudi

Buruh pelabuhan membongkar beras impor asal Thailand dari kapal kargo di Pelabuhan Boom Baru, Palembang, Sumatera Selatan, Jumat (1/3/2024).

SUNGGUH SUNGGUH TERJADI

● **KAMIS 22 Februari 2024 siang, rekan saya kehilangan HP dan dicari-cari tidak ketemu. Ia minta murid-murid membantu mencari dan yang menemukan akan diberi hadiah Rp 100.000. Murid-murid kemudiian berlarian mencari HP itu. Ternyata HP tersebut terbawa guru lain karena serupa dengan kepunyaan kawan saya. (Heri Setiyono, Ndalem Guwosari Pajangan)-d**